

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan blokade di Laut Merah yang dilakukan oleh Kelompok Houthi sebagai *Non-State Armed Group* serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum internasional yang dapat dibebankan atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade dalam hukum internasional secara tradisional merupakan metode perang yang dilakukan oleh negara dalam konteks konflik bersenjata internasional dan harus memenuhi prinsip pembentukan yang sah, efektivitas, proporsionalitas, notifikasi, imparialitas, serta penghormatan terhadap hak netral. Tindakan blokade oleh Kelompok Houthi dalam konflik bersenjata non-internasional di Yaman tidak memenuhi karakteristik blokade yang sah menurut hukum internasional dan berpotensi melanggar kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional. Sebagai kelompok bersenjata non-negara yang memiliki tingkat organisasi dan kontrol wilayah tertentu, Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional serta kemungkinan pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran serius hukum internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan rezim pertanggungjawaban terhadap aktor non-negara dalam konflik modern.

Kata kunci: *Non-state Armed Group*, Kelompok Houthi, Tindakan Blokade

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the legality of the Red Sea blockade carried out by the Houthi group as a Non-State Armed Group and to examine the forms of international legal responsibility that may arise from such actions. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, under international law, blockade is traditionally recognized as a method of warfare conducted by states in the context of an international armed conflict and must comply with the principles of proper establishment, effectiveness, adequate notice, impartial application, and respect for neutral rights. The blockade conducted by the Houthi group within the framework of a non-international armed conflict in Yemen does not fulfill the legal requirements of a lawful blockade under international law and potentially violates the principle of freedom of navigation as regulated under the law of the sea. As a non-state armed group possessing a certain level of organization and territorial control, the Houthis may incur responsibility under international humanitarian law, including potential individual criminal responsibility for serious violations of international law. This research highlights the necessity of clarifying accountability regimes for non-state actors in contemporary armed conflicts.*

*Keyword: Non-State Armed Group, Houthi Group, Blockade*